



Pragmatik dan Hermeneutik sebagai Kerangka Analisis Komunikasi Politik dalam Organisasi Islam

Muhammad Hildan Azizi

STID Al-Hadid, Surabaya
hildan@stidalthadid.ac.id

Abstrak: Kajian pragmatika dan hermeneutika yang kompleks perlu didudukkan dengan tepat agar kerangka keterampilan analisis komunikasi politik pada organisasi keislaman dapat diterapkan secara tepat dan cepat. Studi ini bertujuan mendudukkan kedua perangkat ilmu itu dengan menganalisis kasus pidato Ahok (2017) dan Abdullah bin Ubay (Ekspedisi Musthaliq). Berdasarkan metode kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji pendapat ahli linguistik dan ahli komunikasi dalam memaknai teks politik yang didapatkan datanya dari salinan putusan pengadilan di website Mahkamah Agung dan artikel jurnal ilmiah nasional. Temuan menunjukkan bahwa pragmatika efektif mengidentifikasi tindak tutur terselubung seperti kampanye atau provokasi, sementara hermeneutika membantu memahami konteks di balik teks. Namun, kedua pendekatan memiliki kelemahan: analisis fragmen teks (hermeneutika) berisiko mengabaikan keseluruhan pesan, sedangkan pragmatika sering gagal mengaitkan tuturan dengan strategi politik. Studi ini menekankan pentingnya integrasi kedua pendekatan secara interdisipliner dengan teori kekuasaan untuk mengungkap relasi bahasa, konteks, dan agenda politik.

Kata kunci: pragmatik, hermeneutik, komunikasi politik, organisasi keislaman

Abstract: Pragmatics and Hermeneutics as Frameworks for Political Communication Analysis in Islamic Organisations. The complex studies of pragmatics and hermeneutics need to be properly positioned so that the framework of political communication analysis skills in Islamic organizations can be applied precisely and quickly. This study aims to situate the two sets of knowledge by analyzing the cases of Ahok's speech (2017) and Abdullah bin Ubay (Musthaliq Expedition). Based on the descriptive-analytical qualitative method, this study examines the opinions of linguists and communication experts in interpreting political texts obtained from court decisions on the Supreme Court website and national scientific journal articles. The findings show that pragmatics is effective in identifying covert speech acts such as campaigning or provocation, while hermeneutics helps understand the context behind the text. However, both approaches have weaknesses: the analysis of text fragments (hermeneutics) risks ignoring the overall message, while pragmatics often fails to link speech to political strategies. This study emphasizes the importance of integrating both approaches in an interdisciplinary manner with theories of power to reveal the relationship between language, context and political agenda.

Keywords: pragmatics, hermeneutics, political communication, islamic organization

Pendahuluan

Organisasi masyarakat—termasuk juga organisasi keislaman—di Indonesia tak luput dari dinamika politik, baik yang terjadi di dalam internal, maupun intervensi dari eksternal. Seperti halnya dinamika dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang pada tahun 2015,¹ atau infiltrasi partai politik yang menjangkiti Muhammadiyah pada rentang tahun 2005-2006.² Fenomena ini merupakan hal yang alamiah terjadi, sebab politik kekuasaan tidak hanya terdapat dalam ruang-ruang kenegaraan, melainkan juga hadir dalam berbagai aspek masyarakat, menciptakan dinamika yang kompleks antara individu dan kelompok dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari.³

Menghadapi dinamika politik demikian, para pimpinan, pengurus, atau anggota organisasi keislaman di Indonesia perlu memiliki keterampilan politik yang memadai, termasuk komunikasi politik pada organisasi.⁴ Sebab strategi politik yang mungkin diterapkan oleh pelaku-pelaku politik terhadap organisasi akan selalu diwujudkan dalam bentuk komunikasi.⁵ Keterampilan ini tidak hanya penting untuk memperkuat posisi organisasi, tetapi juga untuk membangun hubungan yang

konstruktif dengan berbagai *stakeholder*, sehingga dapat mengoptimalkan pengaruh dan kontribusi dalam masyarakat.

Salah satu sub-keterampilan dalam komunikasi politik adalah kemampuan analisis terhadap teks-teks politik yang cenderung kompleks.⁶ Kemampuan ini memungkinkan individu untuk memaknai, menganalisis sifat-sifat politik, bahkan juga mengungkap skenario politik di balik pesan-pesan yang disampaikan oleh pelaku-pelaku politik terhadap organisasi. Keterampilan analisis ini sangat penting dalam memahami konteks yang lebih luas dari setiap pesan-pesan di dalam komunikasi organisasi, sehingga para pemegang otoritas dalam organisasi dapat merespons dengan tepat dan strategis terhadap tantangan politik yang dihadapi.

Artikel ini memfokuskan pada pentingnya tahap pemaknaan pesan sebagai bagian dari keterampilan analisis komunikasi politik. Proses pemaknaan ini tidak hanya melibatkan interpretasi teks kebahasaan saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi bagaimana pesan itu diproduksi.⁷ Proses ini memerlukan

¹ Abdul Hakim Syafi'i, Budhi Gunawan, and Firman Manan, "Intervensi Partai Politik Dalam Sukses Kepemimpinan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke 33 Di Jombang Tahun 2015," *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (2019): 213, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13622>.

² Nur Wahid, "Jalan Dakwah PKS Dalam Tubuh Muhammadiyah (Kasus Di Yogyakarta Dalam Perspektif Politik Hannah Arendt)," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 5, no. 2 (2013): 1–26.

³ Jonathan Junges et al., "Analysis on The Variations of The Concept of Power in The Political and Social Environment," *International Journal for Innovation Education and Research* 7, no. 5 (May 31, 2019): 412–18, <https://doi.org/10.31686/ijer.vol7.iss5.1544>.

⁴ Gerald R. Ferris et al., "Political Skill in Organizations," *Journal of Management* 33, no. 3 (June 1, 2007): 290–320, <https://doi.org/10.1177/0149206307300813>.

⁵ F. Christopher Arterton, "Strategic Political Communications," in *Strategy in Politics* (Oxford University Press New York, 2023), 91–116, <https://doi.org/10.1093/oso/9780197644836.003.0005>.

⁶ Petro Tolochko and Hajo G. Boomgaarden, "Determining Political Text Complexity: Conceptualizations, Measurements, and Application," *International Journal of Communication* 13 (2019): 1784–1804.

⁷ Alan Surya and Fenny Mahdaniar, "Peta Teori Hermeneutik Dan Implikasinya Dalam Komunikasi

kepekaan terhadap relasi kuasa yang ada di balik pesan, sehingga individu dapat mengidentifikasi tindakan sebenarnya di balik tuturan pembuat teks.⁸ Dengan demikian, dugaan adanya dimensi politik yang tersembunyi dalam setiap interaksi dapat diungkap, memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tujuan pengirim pesan.

Penjelasan tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa analisis komunikasi politik berkaitan erat dengan studi tindak tutur sebagai konsep utama dalam kajian pragmatik.⁹ Analisis ini berarti membuka ruang untuk memahami bagaimana konteks situasional dan latar belakang sosial-budaya dapat memengaruhi makna yang diproduksi pembuat teks dan makna yang ditangkap oleh penerima teks, serta mengapa sikap atau respons perlokusi tertentu muncul dalam komunikasi.¹⁰ Bahwa pesan-pesan yang disampaikan pengirim teks bukanlah hanya sekadar tindakan transfer informasi saja, melainkan dapat juga merupakan tindakan memprovokasi, mengadudomba, bahkan termasuk

mengkriminalisasi; sebagaimana terjadi dalam komunikasi politik.

Selain itu, penjelasan tersebut, serta kajian serupa lainnya, secara tidak langsung menunjukkan bahwa analisis komunikasi politik juga berhubungan dengan studi interpretasi teks sebagai bagian dari kajian hermeneutika.¹¹ Bahwa pendekatan ini memungkinkan eksplorasi hubungan antara bahasa, konteks, dan kekuasaan dalam membentuk narasi politik yang dapat memengaruhi audiens dan otoritas organisasi.¹² Pendekatan ini juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap retorika yang digunakan oleh pembicara untuk membangun legitimasi dan kepercayaan di mata publik, serta bagaimana elemen-elemen tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu.¹³

Permasalahannya, perangkat ilmu pragmatik dan hermeneutik cenderung relatif kompleks untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Misalnya seperti tahapan interpretasi gramatis dan interpretasi sosiologis sebagaimana dipaparkan oleh Schleiermacher yang

Dakwah," *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (January 30, 2024): 169–90, <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v2i1.23>.

⁸ Akhmad Saifudin, "Teori Tindak Tutur Dalam Studi Linguistik Pragmatik," *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 15, no. 1 (April 8, 2019): 1–16, <https://doi.org/10.33633/lite.v15i1.2382>.

⁹ Dániel Z. Kádár and Juliane House, "The Pragmatics of Language and Politics," in *The Encyclopedia of Applied Linguistics* (Wiley, 2023), 1–6, <https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal1464.pub2>.

¹⁰ Marina Sbisa, "Speech Acts, Effects, and Responses," in *Essays on Speech Acts and Other Topics in Pragmatics*, ed. Marina Sbisa (Oxford University Press/Oxford, 2023), 43–52, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192844125.003.0003>.

¹¹ Zhang Longxi, "Hermeneutics and Politics: Going beyond the Book," *KNOW: A Journal on the Formation*

of Knowledge 6, no. 2 (September 1, 2022): 239–62, <https://doi.org/10.1086/721453>.

¹² Benny Susetyo, "Constellation Of Power Behind Communication Presidential In Intolerance Issues (Critical Discourse Analysis of the President's Statement in the Case of Meliana in Tanjungbalai)," *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 3, no. 2 (July 31, 2022): 313–31, <https://doi.org/10.38142/ijesss.v3i2.216>.

¹³ Brett Ommen, "On the Relationship between Voice and Authority in on Message Communication," *Javnost - The Public* 17, no. 4 (January 10, 2010): 63–79, <https://doi.org/10.1080/13183222.2010.11009041>.

¹⁴ Ilya Srubar, "Pragmatic Theory of the Life-World and Hermeneutics of the Social Sciences," in *Schutzian Phenomenology and Hermeneutic Traditions*, ed. Michael Staudigl and George Berguno (Dordrecht: Springer Netherlands, 2014), 83–92, https://doi.org/10.1007/978-94-007-6034-9_6.

cukup panjang prosesnya.¹⁵ Juga analisis tindak tutur yang tidak sekadar memahami lokusi, melainkan hingga ilokusi dan perlokusinya, juga memerlukan berbagai pendekatan multi disiplin ilmu seperti sosiopragmatik dan lainnya.¹⁶ Sedangkan di sisi lain, kecepatan analisis pesan politik dalam kehidupan organisasi Islam/dakwah dituntut relatif instan agar permasalahan yang ditimbulkan dari suatu komunikasi politik tidak meluas/berlarut-larut.

Oleh karena itu studi ini menjelaskan tentang kedudukan penggunaan hermeneutik dan pragmatik sebagai alat dalam keterampilan analisis komunikasi politik. Sehingga harapannya, organisasi tetap dapat memaknai pesan-pesan politik secara cepat, namun juga kredibel penyimpulan makna teksnya.

Metode

Kajian dilakukan berdasarkan metode kualitatif deskriptif-analitis konseptual, dengan menganalisis *expert opinion* dari para ahli linguistik dan/atau komunikasi ketika menggunakan perangkat ilmu pragmatik dan hermeneutik dalam konteks menganalisis pesan-pesan politik pada dua kasus yang dipilih secara sengaja karena pertimbangan relevansi dan ketersediaan data. Metode ini digunakan agar dapat menjelaskan bagaimana kedua

perangkat ilmu itu diterapkan dalam konteks terapan di kehidupan sehari-hari.

Kasus pertama yakni pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada tahun 2017. Data diambil dari salinan Putusan PN Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR yang memuat argumentasi pemaknaan dua ahli linguistik terhadap pernyataan Ahok itu, yakni Mahyuni (guru besar linguistik Universitas Mataram) dan Herminigildus Bambang Kaswanti Purwo (guru besar linguistik Universitas Atma Jaya) yang berperan sebagai saksi ahli di persidangan.¹⁷ Selain itu data juga diambil dari kajian makna doktor linguistik UIN Malang, yakni Agwin Degaf yang diseminarkan pada Senabastra IX di Universitas Trunojoyo Bangkalan.¹⁸ Berikut juga hasil pemaknaan dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam STID Al-Hadid, Muhammad Hildan Azizi sendiri terhadap pidato Ahok itu berdasarkan kajian pragmatik dan hermeneutik juga digunakan sebagai data pembandingan.

Kasus kedua ialah pidato Abdullah bin Ubay di Sumur Muraisi pada peristiwa Ekspedisi Musthaliq. Data diambil dari tesis akademisi komunikasi dan penyiaran Islam Ahmad Dhiyaul Haq yang salah satu bagian tesisnya membahas makna perilaku munafik Ibnu Ubay pada peristiwa tersebut.¹⁹ Termasuk juga hasil pemaknaan Muhammad Hildan Azizi

¹⁵ Surya and Mahdaniar, "Peta Teori Hermeneutik Dan Implikasinya Dalam Komunikasi Dakwah."

¹⁶ Amy Tsui, "Aspects of the Classification of Illocutionary Acts and the Notion of the Perlocutionary Act," *Semiotica* 66, no. 4 (1987), <https://doi.org/10.1515/semi.1987.66.4.359>.

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Jakarta Utara tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Basuki Tjahaja Purnama (2016).

¹⁸ Agwin Degaf, "Kasus Ahok Dalam Perspektif Ilmu Linguistik," in *Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra IX* (Bangkalan: Universitas Trunojoyo, 2017), 263–69, <http://repository.uin-malang.ac.id/1940/>.

¹⁹ Ahmad Dhiyaul Haq, "Strategi Komunikasi Rasulullah Saw. Menghadapi Pesan Munafik, Provokasi, Dan Hoax Abdullah Bin Ubay Bin Salul" (IAIN Parepare, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6078/>.

sendiri terhadap pidato Ibnu Ubay itu berdasarkan kajian pragmatik dan hermeneutik juga digunakan sebagai data pembandingan.

Hasil dan Pembahasan

Berikut ini merupakan kajian teoretis, sajian data, dan analisis data tentang pemaknaan ahli terhadap teks-teks dalam komunikasi politik.

1. Komunikasi Politik

Esensi dari politik ialah kekuasaan, namun bukan sekadar kekuasaan sosial melainkan merupakan kekuasaan politik yang mengikat di dalam suatu organisasi.²⁰ Misalnya kekuasaan ekonomi atau popularitas seperti artis yang dapat digunakan untuk menggerakkan orang lain, kekuasaan politik berbeda dengan hal itu karena merupakan pengaruh yang telah dilegitimasi secara konsensus oleh seluruh pihak dalam organisasi. Hal itu berkonsekuensi pada politik yang diartikan sebagai kegiatan pengelolaan kekuasaan di dalam suatu organisasi.²¹ Maka komunikasi politik dapat dipahami sebagai pertukaran makna yang terjadi pada kegiatan perebutan, pemertahanan, dan/atau pengembangan kekuasaan di dalam organisasi.

Sifat politik pada suatu komunikasi terkandung di dalam dampak komunikasi itu,²² serta terkandung di dalam hubungan psikologis subjek terhadap dampak komunikasi itu.²³ Suatu komunikasi dapat dikategorikan sebagai politis apabila mampu memengaruhi penguatan atau pelemahan kekuasaan aktor politik, mengubah struktur kekuasaan dalam organisasi, maupun melanggengkan atau membentuk sistem politik berdasarkan norma dan budaya politik yang berlaku. Selain dari segi dampaknya, sifat politik juga dapat dipahami dari psikologis subjeknya. Jika subjek pembuat teks memiliki kehendak atau seminimalnya berkesadaran bahwa komunikasinya dapat berdampak pada kekuasaan politik tertentu, maka komunikasi yang dilakukannya dapat diidentifikasi bersifat politik.

Dalam konteks organisasi keislaman di Indonesia, komunikasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Jika dilihat dari sumbernya, maka terdapat komunikasi politik yang dilakukan oleh pemangku kepentingan internal atau eksternal.²⁴ Jika dilihat dari nilai perilakunya, maka terdapat komunikasi politik yang etis atau tidak etis.²⁵ Jika dilihat dari sasarannya, maka terdapat komunikasi politik yang menysasar

²⁰ Junges et al., "Analysis on The Variations of The Concept of Power in The Political and Social Environment."

²¹ Aris Kristianto and Muhammad Hildan Azizi, "Politik Dan Dakwah Dalam Sirah Nabawiyah: Studi Multikasus," *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 6, no. 1 (July 15, 2024): 23–44, <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v6i1.319>.

²² Trevor Parry-Giles, "Political Communication," in *Communication in the 2020s* (New York: Routledge, 2022), 125–32, <https://doi.org/10.4324/9781003220466-16>.

²³ Bimal Prasad Singh, "A Study on Political Psychology and Its Influence in Modern Politics," *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 11, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.5958/2249-7315.2021.00002.2>.

²⁴ Lisa Kenny, "Organizational Politicking: An Empirical Study on Its Application to Communication" (Lund University, 2019), <http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8982984>.

²⁵ Zikrullah and Mena Sari, "Etika Komunikasi Politik Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Komunikasi Islam* 13, no. 2 (February 28, 2024): 305–22, <https://doi.org/10.15642/jki.2023.13.2.305-322>.

suprastruktur politik seperti elite atau birokrat, serta mungkin juga menyasar infrastruktur politik seperti kelompok kepentingan atau massa.²⁶

Menganalisis komunikasi politik berarti mengidentifikasi sifat politik di balik suatu komunikasi karena tidak semua komunikasi bersifat politik. Indikator sifat politik/tidaknya suatu komunikasi dapat diidentifikasi berdasarkan dampak dan psikologis subjek dari suatu komunikasi.

2. Pragmatik dan Hermeneutik

Pragmatik adalah sebuah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana konteks memengaruhi interpretasi makna dalam komunikasi, termasuk aspek sosial dan situasional dari penggunaan bahasa.²⁷ Penggunaan pragmatik sangat penting dalam memahami konteks dalam percakapan sehari-hari, di mana makna sering kali bergantung pada faktor-faktor seperti nada suara, ekspresi wajah, dan hubungan antara pembicara dan pendengar.²⁸ Pragmatik awal kali dikaji oleh para ahli linguistik pada abad ke-20, dan sejak itu telah berkembang menjadi bidang yang sangat penting dalam studi

bahasa, berkontribusi pada pemahaman komunikasi interpersonal dan interaksi sosial.²⁹

Pragmatik berakar kata dari Yunani yang artinya "tindakan,"³⁰ yang mencerminkan fokusnya pada bagaimana tindakan berbahasa dapat dipengaruhi oleh konteks dan tujuan komunikasi. Hal ini berarti mengasumsikan bahwa komunikasi tidak sekadar didasari atas intensi menyampaikan informasi, melainkan juga terdapat intensi tindakan lainnya yang terkandung secara implisit dalam kognitif pembuat teks.³¹ Seperti misalnya memerintah, meminta maaf, memuji, bahkan termasuk juga pada tindakan bersifat politik seperti mengadudomba, mengkriminalisasi, dan lainnya.

Salah satu teori penting—bahkan adapula yang menyebutnya sebagai yang utama—dalam kajian pragmatik adalah teori tindak tutur.³² Teori ini dikembangkan oleh J.L. Austin dan dilanjutkan oleh John Searle, yang menekankan bahwa setiap ucapan tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga melaksanakan tindakan tertentu dalam konteks sosial.³³ Teori ini

²⁶ Nayara F. Macedo de Medeiros Albrecht, "Bureaucrats, Interest Groups and Policymaking: A Comprehensive Overview from the Turn of the Century," *Humanities and Social Sciences Communications* 10, no. 1 (September 12, 2023): 565, <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02044-8>.

²⁷ Abdurrahman Abdurrahman, "Pragmatik: Konsep Dasar Memahami Konteks Tuturan," *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra* 1, no. 2 (October 12, 2011): 1–19, <https://doi.org/10.18860/ling.v1i2.548>.

²⁸ Nagamurali Eragamreddy, "Exploring Pragmatics: Uncovering the Layers of Language and Meaning," *International Journal of Current Science Research and Review* 7, no. 3 (March 26, 2024): 1886–95, <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i3-50>.

²⁹ Sriwahyuni Dahlan, Melaliani Gaib, and La Aba La Aba, "A Bibliometric Study of Pragmatic Studies in Language Research: Insights and Trend," *Journal of*

English Teaching and Linguistic Issues (JETLI) 2, no. 2 (August 28, 2024): 56–64, <https://doi.org/10.58194/jetli.v2i2.1829>.

³⁰ Bernd Kortmann, "Pragmatics: The Study of Meaning in Context," in *English Linguistics* (Stuttgart: J.B. Metzler, 2020), 173–99, https://doi.org/10.1007/978-3-476-05678-8_7.

³¹ Elly Ifantidou, "Pragmatics and Cognition," in *The Encyclopedia of Applied Linguistics* (Wiley, 2024), 1–7, <https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0933.pub2>.

³² Saifudin, "Teori Tindak Tutur Dalam Studi Linguistik Pragmatik."

³³ Wei Ren, "Speech Acts," in *The Encyclopedia of Applied Linguistics* (John Wiley & Sons, Ltd, 2024), 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal1099.pub2>.

juga menjelaskan bagaimana konteks dan niat penutur dapat memengaruhi makna dari ucapan yang dihasilkan, sehingga penting untuk mempertimbangkan situasi sosial saat menganalisis komunikasi.³⁴

Teori tindak tutur membagi tuturan ke dalam tiga dimensi, yakni lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi adalah ucapan yang dihasilkan secara fisik, yaitu kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Ilokusi adalah tindakan yang dilakukan oleh pembicara melalui ucapan tersebut, mencakup niat dan tujuan di balik kata-kata yang digunakan. Sedangkan perlokusi adalah tindakan atau efek yang dihasilkan pada pendengar sebagai respons terhadap ucapan tersebut, seperti perubahan emosi atau tindakan yang diambil setelah mendengar pernyataan.³⁵ Ketiga dimensi tindak tutur ini saling terkait dan membentuk keseluruhan makna dalam komunikasi.³⁶ Memahami hubungan antara ketiga dimensi ini dapat membantu menganalisis pesan yang disampaikan, serta mengeliminasi potensi kesalahpahaman yang mungkin terjadi akibat perbedaan konteks atau intensi antara pembicara dan pendengar.

Hermeneutik adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari teks atau ucapan, dengan memperhatikan konteks

di mana komunikasi terjadi.³⁷ Hermeneutika dimulai sebagai sebuah metode untuk menafsirkan teks-teks Alkitab, yang akhirnya dapat ditelusuri sejak gereja awal dan abad pertengahan. Istilah ini mulai dikembangkan Matthias Flacius Illyricus pada abad ke-16 untuk menggambarkan metode penafsiran Alkitab.³⁸ Pada abad ke-19, hermeneutika bertransformasi menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang makna dan interpretasi dari semua pernyataan. Pada abad ke-20, Martin Heidegger melakukan radikalasi terhadap hermeneutika dengan menegaskan bahwa interpretasi—sebagai esensi hermeneutika—bukan sekadar pendekatan teknis-intelektual, melainkan bentuk keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

Perkembangan hermeneutika hingga saat ini melibatkan delapan pemikir utama, masing-masing dengan pendekatan yang khas: (1) hermeneutika romantik Friedrich Schleiermacher, (2) hermeneutika ilmu sosial-humaniora Wilhelm Dilthey, (3) hermeneutika faksitas Martin Heidegger, (4) hermeneutika demitologisasi Rudolf Bultmann, (5) hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer, (6) hermeneutika kritis Jürgen Habermas, (7) hermeneutika simbol Paul Ricoeur, dan (8) hermeneutika radikal

³⁴ Emma Borg and Sarah A. Fisher, "Meaning and Intentions," in *Meaning* (Oxford University Press/Oxford, 2025), 81–94, <https://doi.org/10.1093/actrade/9780192866547.003.0006>.

³⁵ Mikhail Kissine, "Locutionary, Illocutionary, Perlocutionary," *Language and Linguistics Compass* 2, no. 6 (November 1, 2008): 1189–1202, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1749-818X.2008.00093.x>.

³⁶ Marina Sbisà, "Locution, Illocution, Perlocution," in *Pragmatics of Speech Actions*, ed. Marina Sbisà and Ken

Turner (Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2013), 25–76, <https://doi.org/10.1515/9783110214383.25>.

³⁷ Surya and Mahdaniar, "Peta Teori Hermeneutik Dan Implikasinya Dalam Komunikasi Dakwah."

³⁸ Budi F Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik Dari Scheleimajer Sampai Derrida*, ed. Widianoro (Sleman: PT. Kanisius, 2015).

³⁹ Leszek Kleszcz, "Hermeneutic Reason as the 'Art of Understanding,'" *Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies* 37, no. 3 (2021): 441–48, <https://doi.org/10.21638/spbu17.2021.306>.

Jacques Derrida.⁴⁰ Seluruh pemikir tersebut sepakat bahwa analisis teks tidak dapat dibatasi pada aspek linguistik semata, melainkan harus juga pertimbangan konteks yang meliputi dimensi psikologis pembuat teks, kondisi sosio-kultural, serta faktor-faktor eksternal relevan lainnya. Hanya saja masing-masingnya punya konsep yang berbeda mengenai makna teks, ada yang menganggap makna itu statis, namun juga ada yang menganggap dinamis. Hal ini berkonsekuensi pula pada langkah kerja interpretasi teks yang berbeda-beda dari para pemikir hermeneutik itu.⁴¹

Dalam keragaman pendekatan hermeneutis, kebutuhan analisis komunikasi politik—yang sarat dengan bahasa konotatif dan implisit—menjadikan paradigma intensionalis (yang menempatkan makna pada maksud pembuat teks) sebagai kerangka yang paling relevan. Artinya, makna dipahami sebagai sesuatu yang statis, yakni suatu tindak tutur yang memang dikehendaki atau seminimalnya disadari oleh pembuat teks. Misalnya seorang pelaku politik berintensi mengujarkan kebencian kepada sasaran politiknya dengan menyatakan bahwa sasarannya itu adalah orang yang dungu, maka makna pernyataannya adalah mengujarkan kebencian. Sekalipun terdapat banyak pengamat atau akademisi—yang mungkin melibatkan kepentingannya—menyatakan bahwa hal

itu adalah sebagai kritik (bukan ujaran kebencian), tetap makna sebenarnya adalah ujaran kebencian.

Secara umum, terdapat tiga tahapan dalam langkah kerja memaknai teks sebagai bagian utama dari kajian hermeneutik, yakni menetapkan ilmu terkait yang relevan dengan ruang lingkup teks sebagai bagian dari kajian interdisipliner, mengurai dan menganalisis aspek kebahasaan yang terkandung dalam teks, serta mengurai dan menganalisis aspek nonkebahasaan di balik teks.⁴²

3. Analisis Komunikasi Politik dalam Kasus Pidato Ahok pada 2017

Konteks pidato yang dilakukan oleh Ahok terkait dengan kunjungan kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk meninjau program pemberdayaan budi daya kerapu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.⁴³ Namun disaat yang bersamaan, Ahok juga telah resmi terdaftar sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta dalam rangkaian Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.⁴⁴

Ahok menyampaikan sambutan dihadapan warga kurang lebih sekira satu jam lebih. Terdapat beberapa pernyataan yang kemudian menjadi polemik di tengah masyarakat luas, khususnya pada menit 23:40 hingga 25:35 yang membahas tentang Q.S. Al Maidah ayat 51 sebagaimana dikutip sebagian pernyataannya di bawah.

⁴⁰ Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik Dari Scheleimajer Sampai Derrida*.

⁴¹ Surya and Mahdaniar, "Peta Teori Hermeneutik Dan Implikasinya Dalam Komunikasi Dakwah."

⁴² Surya and Mahdaniar.

⁴³ Niken Purnamasari and Fajar Pratama, "Kisah Pidato Di Pulau Seribu Yang Bawa Ahok Ke Cipinang," detiknews, 2017, [https://news.detik.com/berita/d-](https://news.detik.com/berita/d-3496447/kisah-pidato-di-pulau-seribu-yang-bawa-ahok-ke-cipinang)

[3496447/kisah-pidato-di-pulau-seribu-yang-bawa-ahok-ke-cipinang](https://news.detik.com/berita/d-3496447/kisah-pidato-di-pulau-seribu-yang-bawa-ahok-ke-cipinang).

⁴⁴ Jessi Carina, "Pilkada DKI 2017 Resmi Diikuti Tiga Pasang Cagub-Cawagub," *kompas.com*, 2016, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/24/17335191/pilkada.dki.2017.resmi.diikuti.tiga.pasang.cagub-cawagub>.

*"Jadi enggak usah pikiran 'Ah nanti kalau enggak kepilih pasti Ahok programnya bubar'. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macam-macam gitu lho (orang-orang tertawa-red). Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu enggak usah merasa enggak enak."*⁴⁵

Banyak ahli linguistik yang telah memaknai pernyataan Ahok itu secara kompeherensif, beberapa di antaranya menjadi saksi ahli jaksa penuntut umum yakni Mahyuni, juga saksi ahli terdakwa yakni Herminigildus Bambang Kaswanti Purwo, serta akademisi yang mempublikasikan kajiannya dalam artikel jurnal ilmiah yakni Agwin Degaf. Berikut ini merupakan hasil dan argumentasi pemaknaan masing-masingnya.

a) Analisis Makna Pidato Ahok oleh Mahyuni

Pertama pemaknaan dari Mahyuni yang menyimpulkan bahwa pidato tersebut bermakna Ahok sedang berkampanye dan menistakan/menodai/menghina agama Islam.⁴⁶

Argumentasi yang ia ajukan bahwa secara sintaksis, kata 'bohong' dalam frasa "...dibohongin pakai surat Al Maidah 51..." saja sudah berkonotasi negatif. Frasa itu juga menempatkan ayat Al-Qur'an tersebut sebagai sumber atau alat kebohongan,

hal ini berarti pengujarnya yakin ayat itu berisi kebohongan, sedangkan di sisi lain menandakan bahwa ada yang membohongi (mungkin penceramah) dan ada yang dibohongi (umat muslim).

Lebih lanjut Mahyuni juga berargumentasi bahwa pernyataan Ahok itu *out of context* dari kepentingan awal Ahok datang ke Pulau Pramuka yakni dalam rangka kunjungan kerja terkait panen budidaya kerapu. Bahkan menurut Mahyuni, Ahok juga menegaskan bahwa warga Pulau Pramuka tetap harus konsisten melaksanakan program budidaya itu sekalipun tidak terpilih kembali menjadi gubernur. Pernyataan ini menurut Mahyuni semakin menguatkan asumsi bahwa kepentingan awal Ahok datang ke Pulau Pramuka atas dasar tujuan kunjungan kerja.

Selain itu Mahyuni juga menjelaskan analisis kesengajaan Ahok dalam menyampaikan pesan itu. Asumsinya menurut Mahyuni bahwa selalu ada maksud di balik setiap pilihan kata yang diujarkan seseorang. Sehingga pilihan kata 'bohong' yang digunakan Ahok, menurutnya sudah bermaksud menegasi makna positif dengan kata yang negatif.

Juga Mahyuni menjelaskan bahwa satu kata dalam kesatuan wacana merupakan hal yang penting, sekalipun dalam konteks komunikasi lisan dimisalkan perbandingannya hanya satu menit pernyataan dari satu jam keseluruhan pidato. Menurutny akan selalu ada makna khusus yang menjadi *core* atau inti pesan dari

⁴⁵ Herianto Batubara, "Ini Video Utuh Ahok Pidato Singgung Surat Al Maidah 51 Yang Jadi Polemik," detiknews, 2016, [https://news.detik.com/berita/d-](https://news.detik.com/berita/d-3315258/ini-video-utuh-ahok-pidato-singgung-surat-al-maidah-51-yang-jadi-polemik)

3315258/ini-video-utuh-ahok-pidato-singgung-surat-al-maidah-51-yang-jadi-polemik.

⁴⁶ Indonesia, Putusan PN Jakarta Utara tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Basuki Tjahaja Purnama.

kesatuan wacana, tidak bisa suatu fragmen dipisah-pisah dari wacananya.

Dengan demikian Mahyuni dapat menganalisis makna bahwa Ahok sedang berkampanye karena kerap menggunakan kata 'pilih' dalam konteks kampanye pilgub yang diikuti oleh Ahok. Meski memang Mahyuni akui tidak ada pernyataan eksplisit dari Ahok untuk memilih dia, namun menurutnya, pernyataan Ahok merupakan tindakan seolah-olah kampanye karena menunjukkan kekhawatiran tidak terpilih.

Tak kalah penting, Mahyuni menguraikan bahwa Ahok menggunakan frasa '...iya kan...' yang menurutnya merupakan suatu penegasan tentang ada orang yang menggunakan Al-Maidah 51 untuk membohongi orang lain.

Di luar aspek kebahasaan, Mahyuni juga membongkar konteks yang melingkupi pidato Ahok. Bahwa Ahok memang sedang mengemban jabatan Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2017, namun Ahok juga menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada momen pilgub. Jika dikaitkan dengan pernyataan Ahok, Mahyuni mengungkapkan bahwa Ahok sedang mengekspresikan keraguan/ketidakpercayaan diri tidak dipilih lagi karena ada orang yang menggunakan Al-Maidah 51 sebagai sarana untuk membohongi orang lain.

Di samping itu, Mahyuni menilai komunikasi terjadi dalam kondisi yang tidak setara, Ahok sebagai pejabat sedangkan warga sebagai rakyat biasa. Hal ini memungkinkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Mahyuni membandingkan dengan konteks komunikasi terhadap te-

man sekelas/seprofesi. Sehingga menurutnya jika ada orang yang optimis dan yakin tidak ada yang lebih baik darinya mengatakan, "Jika ada yang lebih baik, maka pilih lainnya," sebenarnya sedang mengatakan bahwa pilih dia saja karena tidak ada yang lebih baik.

b) Analisis Makna Pidato Ahok oleh Hermi-nigildus Bambang Kaswanti Purwo

Bambang Purwo menyimpulkan bahwa Ahok memotivasi warga melanjutkan program budidaya kerapu meski tidak terpilih lagi. Hal ini menunjukkan tuduhan penistaan agama tidak terbukti secara linguistik. Menurut Purwo, frasa "dibohongi pakai surat Al Maidah" harus dipahami sebagai kritik terhadap instrumentalisasi ayat dalam politik, bukan penodaan agama itu sendiri.

Purwo terlebih dulu memaparkan asumsi-asumsi dasar yang melandasi pemaknaan yang dilakukannya. Bambang Purwo menegaskan bahwa pemaknaan kalimat tidak dapat dilepaskan dari konteks komunikasi. Ia menjelaskan bahwa analisis linguistik struktural semata—seperti tata kata atau kalimat—tidak cukup untuk memahami maksud sebenarnya. Pragmatika dan hermeneutika diperlukan untuk mengkaji faktor ekstralinguistik, seperti identitas pembicara, audiens, lokasi, waktu, serta topik besar yang melatarbelakangi tuturan. Dalam konteks kasus ini, pemenggalan kalimat "...dibohongi surat Al Maidah..." tanpa memerhatikan keseluruhan pidato dianggap sebagai kesalahan metodologis yang berpotensi menyesatkan.

Purwo menganalisis kalimat "...dibohongi surat Al Maidah..." dengan mengaktifkan

unsur elipsis menjadi "orang membohongi warga dengan surat Al Maidah." Ia menekankan bahwa pilihan kata pasif ("dibohongi") dalam komunikasi lisan bersifat lazim dan tidak mengubah inti pesan. Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kalimat tersebut muncul sebagai anak kalimat (*subordinate clause*) yang berfungsi sebagai penjelas, bukan inti pesan utama pidato.

Purwo juga melakukan analisis kuantitatif yang menunjukkan bahwa pidato Ahok di Kepulauan Seribu terdiri dari 2.987 kata, dengan kata kunci seperti "program" (dominan), "pilih" (14 kali), dan "Al-Maidah" (1 kali). Ia menegaskan bahwa fokus utama pidato adalah keberlanjutan program pembangunan, bukan isu pilkada. Pernyataan "...jangan pilih saya..." muncul sebagai upaya retorik untuk menegaskan komitmen pada program, bukan kampanye elektoral.

Purwo mengkritik penggunaan transkripsi tertulis sebagai dasar analisis, karena menghilangkan aspek prosodi (nada, jeda, penekanan) dan visual (ekspresi wajah, gestur). Ia mencontohkan bahwa audiens di Kepulauan Seribu merespons kalimat kontroversial dengan tertawa, bukan kemarahan—indikator penting yang tak tercermin dalam teks. Transkripsi juga gagal menangkap struktur wacana lisan yang dinamis, seperti penggunaan "ya kan?" sebagai penanda konfirmasi partisipatif.

Ahli ini menyoroti bahwa viralnya klip pendek di media sosial telah mencabut tuturan dari konteks aslinya. Eksperimen Purwo dengan kalimat "Aku bangkit menerimanya" membuktikan bahwa potongan kalimat tanpa konteks memicu interpretasi liar. Dalam kasus Ahok,

pengungkapan sepihak mengubah wacana lokal terbatas menjadi isu nasional, padahal audiens langsung tidak mempersoalkannya.

Purwo membedakan antara *meaning* (makna leksikal) dan *intention* (maksud pembicara). Surat Al Maidah, sebagai ayat suci, secara semantik tidak bisa dianggap sebagai "sumber kebohongan." Namun, penggunaan politik atas teks tersebut oleh aktor tertentu—seperti dalam selebaran pilkada—adalah persoalan pragmatis. Ia menekankan bahwa maksud Ahok perlu ditafsirkan melalui konteks program pembangunan, bukan narasi agama.

Melalui kajian spektrogram, Purwo membuktikan bahwa kalimat tentang Al Maidah diucapkan dengan nada rendah dan tempo cepat, berbeda dengan intonasi tinggi pada kalimat inti tentang program. Analisis sintaksis juga menunjukkan bahwa frasa tersebut berada dalam anak kalimat, menegaskan statusnya sebagai informasi sekunder.

Purwo menghubungkan tuturan Ahok dengan pengalaman pilkada sebelumnya di Bangka Belitung, di mana selebaran bermuatan ayat Al-Maidah 51 digunakan secara politis. Hal ini, menurutnya, membentuk "memori kolektif" yang memengaruhi konstruksi wacana Ahok—bukan sebagai penistaan, melainkan refleksi atas penyalahgunaan teks agama dalam politik.

Kesaksian ini menguatkan teori bahwa makna tuturan terikat pada *speech event* (peristiwa tutur). Purwo menolak analisis berbasis niat (yang bersifat subjektif), tetapi berfokus pada maksud yang dapat diverifikasi melalui konteks linguistik dan

sosiokultural. Ia menyimpulkan bahwa tuduhan penistaan agama tidak berdasar jika tuturan dikaji secara holistik, bukan melalui potongan dekontekstual.

c) Analisis Makna Pidato Ahok oleh Agwin Degaf

Agwin Degaf menyimpulkan makna pernyataan dalam pidato itu yakni Ahok sedang menunjukkan kepada ibu-ibu Kepulauan Seribu bahwa Al-Maidah 51 telah dipolitisir. Degaf menegaskan bahwa akar polemik pernyataan Ahok terletak pada makna konotatif, bukan struktur gramatikal aktif-pasif. Kata "dibohongi" membawa muatan emosi negatif yang memicu reaksi keras masyarakat, berbeda dengan sinonim seperti "ditipu" yang lebih netral. Analoginya, kata "kerempeng" (negatif) versus "langsing" (positif) menunjukkan betapa konotasi memengaruhi persepsi. Pemilihan diksi ini memperuncing sentimen keagamaan, terutama ketika diucapkan oleh Ahok sebagai *out-group* (non-Muslim), sehingga dianggap melegitimasi stereotip anti-Islam.

Selain itu Degaf mengkritik penggunaan konstruksi pasif "dibohongi pakai Surat Al Maidah" yang mengaburkan aktor politik di balik instrumentalisasi ayat. Dalam analisisnya, struktur pasif memindahkan fokus publik dari pelaku (oknum politisi/ulama) ke teks suci, seolah Al Maidah menjadi "sumber kebohongan". Jika Ahok menggunakan kalimat aktif ("Oknum X membohongi warga..."), isu akan terfokus pada aktor, bukan agama. Kesalahan

strategi linguistik ini menciptakan ruang bagi politisasi identitas religius.

Sejalan teori "us vs. them" ala van Dijk,⁴⁷ Degaf menjelaskan eskalasi konflik sebagai benturan identitas. Sebagai non-Muslim (*out-group*), Ahok dianggap tidak *legitimate* ketika mengutip ayat Al-Qur'an, berbeda dengan partai Islam yang menggunakan ayat serupa tanpa kontroversi. Contohnya, Seorang jurkam partai Islam mengklaim bahwa memilih partainya sama dengan masuk surga, mengutip Q.S. At-Taubah: 72 tentang "surga yang dijanjikan untuk orang beriman". Fenomena ini mencerminkan bias dalam memaknai wacana berdasarkan identitas pembicara.

Degaf menekankan prinsip pragmatik bahwa makna ujaran terikat konteks. Khalayak di Kepulauan Seribu—yang menyaksikan pidato secara langsung—tidak tersinggung dan memahami pesan dalam kerangka program pembangunan. Namun, ketika ujaran dicabut dari konteks dan disebarkan ke publik luas (terutama *out-group*), interpretasi bergeser ke ranah agama. Degaf mempertanyakan logika hukum yang mendasarkan tuntutan pada reaksi pihak tak terlibat, analog dengan mempersoalkan obrolan kasar di Surabaya yang hanya relevan bagi partisipan langsung.

Lebih lanjut Degaf mengkritik proses hukum yang mengabaikan konteks situasi dan mengandalkan analisis teks transkrip semata. Ia menyarankan pendekatan multidisiplin—menggabungkan linguistik korpus, analisis wacana kritis, dan sosiologi

⁴⁷ Xin Zhao, "Constructing the 'Us' and 'Them' Dichotomy through the Notion of Responsibility: An Integrated Framework," *Global Media and*

Communication 19, no. 1 (April 25, 2023): 119–38, <https://doi.org/10.1177/17427665231161805>.

politik—untuk memahami kompleksitas komunikasi politik.

d) Analisis Makna Pidato Ahok oleh Muhammad Hildan Azizi

Hildan Azizi mengasumsikan bahwa terdapat kemungkinan multi-makna dalam satu teks yang sama. Pada teks pidato Ahok itu, terdapat empat makna yang dapat diidentifikasi. Pertama, pidato itu bermakna Ahok mendorong keseriusan warga lanjutkan program budidaya ikan.

Pidato Ahok menekankan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam melanjutkan program budidaya ikan kerapu sebagai solusi ekonomi berkelanjutan. Secara pragmatik, tuturan ini berfungsi sebagai *directive act* yang bertujuan memobilisasi partisipasi warga. Ahok memaparkan keunggulan budidaya dibanding penangkapan tradisional, seperti stok ikan yang terjamin, sistem bagi hasil 80:20 yang menguntungkan warga, serta potensi pariwisata berbasis koperasi *bottom-up*. Program ini dirancang sebagai *win-win solution*: meningkatkan ekonomi lokal sekaligus memenuhi kebutuhan ikan di Jakarta.

Konteks situasi pidato—kunjungan kerja resmi di hadapan pejabat dan 200 warga *pilot project*—memperkuat fungsi *illocutionary* sebagai janji politik (*commissive*). Ahok, dengan karakter pebisnis yang tegas, menekankan bahwa program ini telah dikaji sejak 2015 dan memerlukan dukungan warga sebagai mitra strategis. Dari perspektif hermeneutik, pemilihan kata "*pilot project*" dan "koperasi" merefleksikan narasi pembangunan partisipatif yang ingin ia bangun, meski tetap dalam kerangka efisiensi ekonomi.

Namun, keberhasilan program bergantung pada keberlanjutan politik. Ahok secara implisit mengaitkannya dengan Pilgub 2017: "Jangan sampai program ini terhambat gara-gara pilkada." Di sini, ia menggunakan strategi *presupposition* untuk menyiratkan bahwa perubahan kepemimpinan berisiko mengganggu program. Pesan ini ditujukan untuk membangun loyalitas warga sebagai penerima manfaat langsung, meski secara demografis suara mereka minoritas (kurang dari 15.000 pemilih).

Lebih lanjut, makna kedua dalam pidato itu yakni Ahok mendidik perilaku memilih warga dari sosiologis ke rasional sekaligus ia berkampanye politik kesuksesan programnya sebagai gubernur.

Bahwa Ahok menggunakan pidato sebagai medium edukasi politik untuk menggeser basis pemilihan dari identitas sosiologis (agama) ke pertimbangan rasional (kinerja program). Melalui kalimat "Jangan pilih saya kalau ada calon yang programnya lebih baik!", ia melakukan *face-saving act* yang paradoks: mengesankan kerendahan hati sekaligus menegaskan keunggulan programnya.

Strategi ini diperkuat dengan menghadirkan anggota DPR-RI sebagai simbol legitimasi nasional. Ahok memposisikan diri sebagai *homo economicus*—pemimpin yang utamakan hasil konkret daripada retorika agama. Dari sudut hermeneutik, frasa "pilih berdasarkan nurani" digunakan untuk mengaburkan makna religius menjadi pertimbangan pragmatis. Hal ini terlihat dari penekanan pada angka-angka teknis (seperti potensi hasil ikan dan skema bagi hasil) sebagai *evidence* pembangunan.

Namun, upaya ini mengandung kontradiksi. Di satu sisi, Ahok ingin dipilih kembali sebagai Gubernur non-Muslim di wilayah mayoritas Islam; di sisi lain, ia mengklaim netralitas politik. Fakta bahwa Jokowi-Ahok kalah di Kepulauan Seribu pada 2012 menunjukkan kompleksitas relasi agama dan elektabilitas. Pidato ini, dengan demikian, merupakan upaya rekontekstualisasi untuk mengubah narasi kegagalan masa lalu menjadi janji keberlanjutan.

Di sisi lain pidato itu juga mengandung makna ketiga, yakni Ahok menistakan Al-Qur'an khususnya Al-Maidah 51 sebagai kebohongan.

Bahwa frasa "...dibohongi Surat Al-Maidah 51..." merupakan fokus bagian makna penistaan agama. Secara sintaksis, kata pasif ini menghilangkan pelaku atau aktor sehingga Al-Maidah diposisikan sebagai alat kebohongan. Analisis hermeneutik mengungkap dua kemungkinan makna: (1) Al-Maidah dianggap sebagai sumber kebohongan, atau (2) oknum tertentu menggunakan ayat tersebut untuk menipu orang lain.

Ahok merujuk pengalaman Pilkada Bangka Belitung, di mana selebaran bermuatan QS 5:51 digunakan untuk menyerangnya sebagai non-Muslim. Dalam konteks ini, frasa tersebut berfungsi sebagai *narrative framing* untuk mengkritik politisasi agama, bukan menistakan kitab suci. Namun, karakter demografis audiens—mayoritas

Muslim dengan literasi rendah—menyebabkan interpretasi bergeser ke ranah teologis.

Jika dilihat dari reaksi audiens langsung (tertawa, tidak tersinggung) menunjukkan bahwa pesan dipahami dalam kerangka kritik politik, bukan penghinaan agama. Namun, ketika direkontekstualisasi di media sosial, frasa ini kehilangan *shared knowledge* antara Ahok dan warga Kepulauan Seribu. Dekontekstualisasi ini memicu *illocutionary silencing*, di mana makna asli tuturan diredam oleh narasi dominan kelompok *out-group*.

4. Analisis Komunikasi Politik dalam Kasus Ibnu Ubay pada Peristiwa Ekspedisi Musthaliq

Konteks sejarah pidato yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay terjadi setelah peristiwa Ekspedisi Musthaliq. Lebih tepatnya setelah terjadi friksi antrian mengambil air di Sumur Muraisi yang berkembang eskalasi konfliknya menjadi pertikaian antara Muhajirin dengan Ansar. Pertikaian itu terdengar Ibnu Ubay, lalu ia berpidato kepada kalangannya sendiri.⁴⁸

Teks pernyataan Ibnu Ubay tentang hal itu, termaktub jelas dalam Q.S. Al Munafiqun 7-8 yang berbunyi: "*Merekalah orang-orang yang berkata (kepada kaum Ansar), 'Janganlah bersedekah kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar (meninggalkan Rasulullah),' padahal milik Allahlah perbendaharaan langit dan bumi. Akan tetapi, orang-orang munafik itu tidak mengerti. Mereka berkata, 'Sungguh, jika kita kembali ke Madinah (dari*

⁴⁸ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, ed. Abu Fira (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 547–48.

perang Bani Mustaliq), pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana," padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin. Akan tetapi, orang-orang munafik itu tidak mengetahui."⁴⁹

Selain itu juga terdapat hadis yang menjelaskan tentang peristiwa itu. Seperti yang termaktub dalam Sahih Bukhari No. 4527 berikut ini: *"Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata, Aku menghafalnya dari Amru bin Dinar ia berkata; Aku mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma berkata; Saat kami berada dalam suatu peperangan, tiba-tiba seorang laki-laki dari kaum Muhajirin mendorong seseorang dari kalangan Anshar, maka sang Anshar pun berseru, "Wahai orang-orang Anshar." Dan sang Muhajir pun berseru, "Wahai orang-orang Muhajirin." Maka Allah memperdengarkan ungkapan itu pada Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda: "Apa-apaan ini?" para sahabat menjawab, "Seorang laki-laki dari kaum Muhajirin mendorong seseorang dari kaum Anshar. Sang Anshar berseru, 'Wahai kaum Anshar.' Dan seorang Muhajir itu pun berseru, 'Wahai kaum Muhajirin.'" Akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tinggalkanlah perbuatan itu, sebab itu adalah kebusukan." Jabir berkata; Jumlah kaum Anshar saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang lebih banyak, namun setelah itu jumlah kaum Muhajirin menjadi lebih banyak dari jumlah mereka. Kemudian Abdullah bin Ubbay berkata, "Bukankah mereka telah melakukannya? Demi Allah, jika kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang mulia akan mengusir orang-orang*

hina darinya." Umar bin Al Khatthab radliallahu 'anhua berkata, "Izinkanlah aku wahai Rasulullah untuk menebas leher orang munafik ini." Tetapi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah ia, agar orang-orang tidak berkomentar bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri."⁵⁰

Sedangkan pada Sirah Nabawayiah terdapat teks yang relatif berbeda meski dengan substansi gagasan pesan yang sama. Hal ini tertulis pada paragraf berikut ini: *"Di kota kita ini sudah banyak Muhajirin. Penggabungan kita dengan mereka akan seperti kata peribahasa: 'Seperti membesarkan anak harimau.' Sungguh, kalau kita sudah kembali ke Madinah, orang yang berkuasa akan mengusir orang yang lebih hina." Kemudian kepada golongannya yang hadir waktu itu ia berkata: "Inilah yang telah kamu perbuat sendiri. Kamu membenarkan mereka tinggal di negerimu ini, dan kamu bagi harta bendamu dengan mereka. Demi Allah, kalau apa yang ada pada kamu itu kamu pertahankan, pasti mereka akan beralih ke tempat lain."⁵¹*

a) Analisis Makna Pidato Ibnu Ubay oleh Ahmad Dhiyaul Haq Bin Mahsyar

Terhadap teks pernyataan dalam Pidato Ibnu Ubay demikian, Mahsyar telah mengkaji dalam tesisnya tentang bentuk pesan Ibnu Ubay itu, yakni dinilainya sebagai tindakan fitnah terhadap Muhajirin (serta secara spesifik terhadap Zaid bin Arqam, yang dianggap telah memberikan laporan palsu). Ia menyoroti ketiadaan bukti konkret dalam klaim Ibnu Ubay bahwa Muhajirin akan mengusir Ansar dari Madinah sepulang ekspedisi.⁵²

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag," accessed May 16, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>; Q.S. Al Munafiqun [63:7-8].

⁵⁰ Syihabudin Ahmad, *Terjemahan Lengkap Sahih Al-Bukhari* (Sungai Buloh: Santai Ilmu Publication, 2022).

⁵¹ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, ed. Ali Audah, 39th ed. (Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2010), 381-82.

⁵² Ahmad Dhiyaul Haq Bin Mahsyar, "Strategi Komunikasi Rasulullah Saw. Menghadapi Pesan Munafik, Provokasi, Dan Hoax Abdullah Bin Ubay Bin

Lebih lanjut, Mahsyar menegaskan bahwa motif Ibnu Ubay sebagai tokoh munafik telah terlihat sejak lama, terutama pada Perang Uhud ketika ia membelotkan 300 pasukan. Perilaku ini konsisten dengan pidatonya di Sumur Muraisi, yang bertujuan melemahkan persatuan umat Islam. Ia juga merujuk kronologi pelaporan ucapan Ibnu Ubay oleh Zaid bin Arqam: meski Nabi awalnya memberi kesempatan klarifikasi, turunnya Surah Al-Munafiqun membuktikan kebohongan Ibnu Ubay. Proses ini, menurut Mahsyar, menunjukkan bahwa fitnah tersebut dirancang untuk memanipulasi opini publik, bahkan di tengah situasi peperangan yang rentan konflik.

Mahsyar membandingkan strategi komunikasi Ibnu Ubay dalam tiga peristiwa berbeda. Pada Perang Uhud, tindakannya berupa provokasi terbuka dengan menarik dukungan pasukan, sementara dalam Haditsul Ifki, ia terlibat menyebarkan kabar bohong (hoaks) tentang Aisyah RA. Adapun di Sumur Muraisi, fitnah yang dilancarkan lebih halus namun berbahaya karena menyasar sentimen kesukuan Ansar. Perbedaan pola ini sedikit banyak telah mengonfirmasi bahwa Ibnu Ubay menggunakan variasi strategi politik dalam komunikasi yang berbeda—provokasi, hoaks, dan fitnah—sesuai dengan konteksnya, namun dengan tujuan tunggal: mengacaukan stabilitas politik Madinah.

Analisis Mahsyar menekankan bahwa klaim-klaim Ibnu Ubay bukan sekadar retorika emosional, melainkan bentuk disinformasi terstruktur. Fakta bahwa wahyu turun untuk membenarkan Zaid bin Arqam

dan mengutuk Ibnu Ubay (Q.S. Al-Munafiqun) menjadi bukti bahwa pesan tersebut mengandung kebohongan yang disengaja. Dengan demikian, Mahsyar menyimpulkan bahwa pidato Ibnu Ubay merupakan bagian dari agenda politik jangka panjang untuk mempertahankan pengaruhnya di Madinah, sekaligus merusak legitimasi Nabi Muhammad dan komunitas Muhajirin sebagai bagian integral dari masyarakat Muslim.

b) Analisis Makna Pidato Ibnu Ubay oleh Muhammad Hildan Azizi

Teks pernyataan Ibnu Ubay itu dimaknai sebagai adu domba antara Muhajirin dengan Ansar berdasarkan tuduhan bahwa Muhajirin yang telah dibantu Ansar lambat laun akan menindas Ansar setelah memiliki pengaruh yang kuat.

Bahwa konteks sosial Madinah pasca-Hijrah menjadi fondasi awal analisis. Sebagai mantan tokoh berpengaruh yang hampir menjadi pemimpin Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad, Ibnu Ubay memiliki ambisi politik yang tertahan. Pernyataannya, “Jika kita kembali ke Madinah, orang yang berkuasa akan mengusir orang yang lebih hina”, tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap dominasi Muhajirin, tetapi juga upaya mengembalikan hegemoni kelompok Ansar—khususnya suku Khazraj—sebagai pemilik legitimasi geografis dan kultural. Pesan ini secara pragmatis ditujukan untuk membangkitkan sentimen superioritas kelompok sekaligus ketakutan akan marginalisasi.

Dari sisi linguistik, metafora “membesarkan anak harimau” yang digunakan Ibnu Ubay merupakan alat retorika untuk menggambarkan Muhajirin sebagai ancaman laten. Analogi ini berfungsi membentuk persepsi bahwa bantuan Ansar selama ini justru melahirkan kekuatan yang berpotensi melukai mereka sendiri. Pernyataan tersebut mengandung instruksi implisit agar Ansar menghentikan dukungan material dan politik kepada Muhajirin, bahkan mengisolasi mereka dari struktur kekuasaan. Hal ini memperlihatkan strategi komunikasi yang memanfaatkan ketakutan kolektif untuk mengubah pola relasi dari kooperatif menjadi konfrontatif.

Pemilihan audiens yang spesifik—kelompok pendukung Ibnu Ubay dari kalangan Ansar—menunjukkan kesadaran akan kerentanan psikologis sasaran. Ansar, yang telah berkomitmen membantu Muhajirin sejak Hijrah, berada dalam fase kritis ketika kontribusi mereka belum sepenuhnya diimbangi pengakuan politik. Ibnu Ubay memanfaatkan friksi kecil, seperti insiden antrean air di Sumur Muraishi, untuk memperkuat narasi ketidakadilan. Tuturan seperti “Inilah yang telah kamu perbuat sendiri” bertujuan menciptakan rasa bersalah sekaligus kemarahan, mendorong pendengar merevisi inklusivitas mereka terhadap Muhajirin.

Profil Ibnu Ubay sebagai aktor politik berpengalaman turut menjelaskan efektivitas pidatonya. Sepanjang hidupnya, ia terlibat dalam mempertahankan konflik internal antara suku Aus dan Khazraj melalui aliansi dengan kelompok Yahudi. Pengalaman dalam *proxy war* ini membentuk kapasitasnya dalam membaca celah sosial dan

merancang pesan yang menyentuh afeksi primordial kelompok. Ambisinya sebagai mantan calon pemimpin Madinah juga mendorongnya untuk memanfaatkan momentum pasca-Kekalahan Uhud, di mana pengaruh Nabi Muhammad sempat dianggap melemah, sebagai kesempatan merebut kembali otoritas.

Hermeneutika mengungkap bahwa kerentanan Ansar tidak hanya bersifat politis, tetapi juga kultural. Sejarah panjang konflik antar-suku di Madinah menciptakan memori kolektif yang mudah dipicu oleh retorika polarisasi kelompok. Meski telah memeluk Islam, loyalitas kesukuan sebagian Ansar masih kuat. Ibnu Ubay dengan licik menggeser narasi persaudaraan Islam ke dalam kerangka kompetisi kelompok, sehingga solidaritas keagamaan dikalahkan oleh sentimen kesukuan. Tuturannya mengubah Muhajirin dari “saudara seiman” menjadi “pendatang yang mengancam”.

Dampak potensial dari pidato ini terlihat dari reaksi Zaid bin Arqam, seorang remaja Ansar yang melaporkan ucapan Ibnu Ubay kepada Nabi Muhammad. Respons ini menunjukkan bahwa provokasi bermuatan fitnah tersebut berhasil menciptakan kegelisahan, meski akhirnya dapat diredam. Secara hermeneutis, intervensi Nabi dalam menyelesaikan konflik menguatkan bahwa ancaman disintegrasi sosial nyata adanya. Pidato Ibnu Ubay bukan sekadar retorika kosong, melainkan upaya sistematis mengubah struktur kekuasaan melalui polarisasi.

5. Penggunaan Pragmatik dan Hermeneutik dalam Analisis Komunikasi Politik Antarkasus

Analisis komunikasi politik memerlukan pendekatan multidisiplin ilmu untuk mengungkap dimensi tersembunyi di balik tuturan. Dalam kasus pidato Ahok (2017) dan Ibnu Ubay (Ekspedisi Musthaliq), para ahli menggunakan kerangka pragmatik dan hermeneutik untuk mengeksplorasi makna, konteks, serta implikasi politik dari kedua peristiwa tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan teks yang tidak hanya berfokus pada struktur linguistik, tetapi juga mempertimbangkan dinamika kekuasaan, identitas, dan relasi sosial yang melatarbelakangi produksi serta interpretasi pesan.

Pada kasus Ahok, penggunaan hermeneutika sebagai pendekatan utama menghadapi tantangan metodologis. Mahyuni, misalnya, membatasi analisisnya pada unit linguistik terbatas (kalimat "dibohongi pakai surat Al Maidah 51") tanpa mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan wacana pidato. Pendekatan ini mengabaikan prinsip hermeneutika Gadamer yang menekankan *fusion of horizons*—proses di mana konteks penafsir dan teks harus berdialog untuk menghasilkan pemahaman holistik.⁵³ Dengan hanya fokus pada fragmen, Mahyuni terjebak pada interpretasi teks yang mereduksi kompleksitas motif politik Ahok, seperti upaya edukasi publik tentang politisasi agama atau kampanye terselubung.

Di sisi lain, Bambang Purwo justru terjebak pada generalisasi umum dengan menganggap keseluruhan pidato sebagai *speech event* yang koheren. Meski analisis

spektrogram dan kuantitatifnya valid, pendekatan ini kurang menangkap pesan-pesan spesifik yang sengaja disisipkan Ahok untuk memengaruhi persepsi pemilih. Pemilihan kata "pilih" 14 kali dalam pidato—meski diklaim sebagai bagian dari motivasi program—tidak dapat dilepaskan dari konteks pilgub. Di sini, hermeneutika seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara makna mikro (kata/kalimat) dan makro (konteks politik), bukan sebagai alat untuk mengaburkan konteks.

Agwin Degaf menambah masalah dengan menyamakan "makna" dengan "efek komunikasi". Analisisnya tentang bias identitas (non-Muslim vs. *in-group*) memang relevan, tetapi ia mengabaikan fakta bahwa efek perlokusi (seperti viralnya klip video) tidak selalu merepresentasikan niat ilokusi pembicara. Hermeneutika seharusnya membedakan antara *authorial intent* (niat Ahok) dan *audience reception* (interpretasi publik), bukan mengaburkannya. Kegagalan ini menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutik tanpa wawasan politik kekuasaan cenderung menghasilkan kesimpangan antara teks dan konteks.

Pragmatika, melalui teori tindak tutur, berhasil mengidentifikasi dimensi kampanye terselubung dalam pidato Ahok. Misalnya, frasa "jangan pilih saya" secara ilokusi berfungsi sebagai *reverse psychology* untuk memperkuat citra Ahok sebagai pemimpin rendah hati. Namun, analisis ini tidak cukup tanpa mengaitkannya dengan strategi politik spesifik. Ahok, sebagai kandidat non-muslim di wilayah mayoritas Islam, memerlukan pendekatan retorika

⁵³ David Vessey, "Gadamer and the Fusion of Horizons," *International Journal of Philosophical Studies*

17, no. 4 (October 2009): 531–42, <https://doi.org/10.1080/09672550903164459>.

yang menggeser basis dukungan dari identitas ke rasionalitas program. Di sinilah keterbatasan pragmatika terlihat: teori ini mampu mengungkap "apa yang dilakukan melalui bahasa", tetapi tidak "mengapa tindakan itu dipilih dalam konteks kekuasaan tertentu".

Kajian Muhammad Hildan Azizi mencoba menjembatani celah ini dengan menghubungkan tuturan Ahok dan relasi kuasa. Analisisnya menunjukkan bahwa klaim "program tetap jalan meski saya tidak terpilih" merupakan strategi untuk melakukan pendidikan politik kepada warga sebagai penerima manfaat, sekaligus mengisolasi isu agama dari narasi pilgub. Pendekatan ini menggabungkan pragmatik (tindak tutur) dengan teori kekuasaan Foucault, di mana bahasa tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga membentuk relasi dominasi. Namun, integrasi semacam ini kurang ditemukan dalam analisis ahli lain, yang cenderung terjebak pada dikotomi "kampanye vs. penistaan".

Pada kasus Ibnu Ubay, hermeneutika berhasil mengungkap makna "fitnah" melalui rekonstruksi konteks historis. Ahmad Dhiyaul Haq Bin Mahsyar, misalnya, menghubungkan pidato di Sumur Muraisi dengan rekam jejak Ibnu Ubay sebagai provokator dalam Perang Uhud dan Haditsul Ifki. Namun, analisis ini minim dukungan data linguistik. Metafora "membesarkan anak harimau" dan diksi "orang mulia akan mengusir yang hina" tidak dikaji secara mendalam sebagai strategi retorika. Padahal, metafora tersebut

mengandung *analogical framing* yang sengaja dipilih untuk membangkitkan ketakutan akan dominasi Muhajirin.

Ketiadaan analisis semantik atau semiotik membuat kesimpulan "fitnah" terkesan umum dan kurang spesifik. Sebagai perbandingan, pendekatan van Dijk dalam *ideological square*—mengangkat kelompok sendiri sambil menstigma *out-group*—⁵⁴ bisa digunakan untuk mengurai bagaimana Ibnu Ubay memposisikan Ansar sebagai "korban" dan Muhajirin sebagai "ancaman". Tanpa eksplorasi linguistik semacam ini, analisis hermeneutik hanya menjadi narasi historis tanpa dasar tekstual yang kokoh.

Temuan menarik dari kedua kasus adalah absennya identifikasi "pendidikan politik" dalam pidato Ahok. Padahal, upaya Ahok untuk menggeser pola pilih berbasis identitas ke pertimbangan rasional (melalui paparan data budidaya kerapu) merupakan bentuk edukasi politik implisit. Kekurangan para ahli dalam melihat hal ini terjadi karena hermeneutika digunakan secara parsial—hanya fokus pada konflik agama atau kampanye—tanpa melibatkan wawasan tentang bagaimana kekuasaan direproduksi melalui pedagogi politik. Atau memang terkait dengan posisi masing-masingnya sebagai saksi ahli di ruang persidangan.

Di sisi lain, pemaknaan "kampanye" dan "penistaan" pada kasus Ahok justru terlalu mengandalkan variabel kontekstual (status non-Muslim, pilgub) tanpa membongkar

⁵⁴ Ali Jalalian Daghigh, Mohammad Saleh Sanatifar, and Rokiah Awang, "Modeling van Dijk's Ideological Square in Translation Studies: Investigating

Manipulation in Political Discourse Translation," *InTralinea: Online Translation Journal* 20 (2018): 1–7, <http://www.intralinea.org/archive/article/2290>.

mekanisme linguistik yang spesifik. Misalnya, penggunaan kata ganti "kita" oleh Ahok ("kita kembali ke Madinah") dalam analogi Pilkada Bangka Belitung merupakan strategi *inclusive we* untuk menyamakan tujuan politik sebagai kepentingan kolektif. Analisis semacam ini memerlukan kombinasi semantik kognitif (untuk mengurai makna kata ganti) dan teori kekuasaan (untuk mengaitkannya dengan strategi pencitraan).

Kelemahan utama penerapan pragmatik dalam analisis komunikasi politik adalah ketidakmampuan untuk mengaitkan tindak tutur dengan varian strategi politik yang kompleks. Misalnya, dalam kasus Ibnu Ubay, tuturan "orang mulia akan mengusir yang hina" tidak hanya mengandung ilokusi provokasi, tetapi juga merefleksikan strategi *divide et impera* untuk mempertahankan pengaruhnya di Madinah. Untuk mengungkap ini, analisis perlu melampaui teori Austin-Searle dan memasukkan konsep *political discourse analysis* yang memetakan tuturan dalam relasi kekuasaan antar-kelompok.

Di sisi lain, keterbatasan data sering menghambat analisis pragmatik yang mendalam. Pada kasus Ibnu Ubay, minimnya rekaman prosodi (nada, jeda) membuat analisis efek psikologis tuturan menjadi spekulatif. Padahal, dalam konteks budaya Arab abad ke-7, tekanan suara dan gestur memiliki peran krusial dalam menyampaikan pesan politik. Kegagalan merekonstruksi aspek non-verbal ini membuat analisis tindak tutur kehilangan dimensi performatifnya.

Studi ini menunjukkan bahwa hermeneutik dan pragmatik harus dipadukan dengan kerangka politik kekuasaan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif.

Pada kasus Ahok, pendekatan hermeneutik dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi relasi kuasa (misalnya, posisi Ahok sebagai pejabat vs. warga), sementara pragmatika berperan mengungkap bagaimana relasi itu direproduksi melalui strategi linguistik (seperti penggunaan *presupposition* dalam "program tetap jalan").

Pada kasus Ibnu Ubay, integrasi ini dapat dilakukan dengan menganalisis metafora "anak harimau" melalui lensa *conceptual metaphor theory* (hermeneutika) sekaligus mengaitkannya dengan teori *soft power* dalam politik (pragmatika). Dengan demikian, fitnah tidak hanya dipahami sebagai tindak tutur, tetapi juga sebagai instrumen untuk menggerakkan sentimen kelompok sebagai modal politik.

Keterbatasan utama penggunaan hermeneutika terletak pada kecenderungannya mengabaikan data linguistik rinci, sementara pragmatika sering gagal mengaitkan tindak tutur dengan strategi politik makro. Untuk mengatasinya, organisasi keislaman perlu mengembangkan protokol analisis yang menggabungkan: (1) Analisis wacana kritis untuk memetakan relasi kuasa dalam teks; (2) Linguistik korpus untuk mengidentifikasi pola bahasa yang berulang; (3) Sejarah sosial untuk merekonstruksi konteks produksi pesan; (4) Teori kekuasaan (seperti Foucault, Gramsci) untuk mengaitkan bahasa dengan agenda politik.

Simpulan

Penggunaan pragmatika dan hermeneutika dalam analisis komunikasi politik ibarat dua sisi mata uang: yang satu mengurai "bagaimana" bahasa bekerja, sementara lainnya menjawab "mengapa" bahasa digunakan dalam konteks tertentu.

Kombinasi keduanya—dengan dukungan wawasan strategi politik kekuasaan—memungkinkan organisasi keislaman tidak hanya menjadi penafsir pasif, tetapi pelaku kritis yang mampu membedah agenda terselubung, merespons tantangan politik secara strategis, dan memperkuat pondasi ideologis organisasi di tengah dinamika kekuasaan yang kompleks.

Temuan ini menegaskan bahwa analisis komunikasi politik tidak boleh berhenti

pada level "makna", tetapi harus sampai pada "efek kekuasaan". Misalnya, dalam menanggapi pidato kontroversial, organisasi perlu: (1) Mengidentifikasi *illocutionary force* (niat politis) di balik tuturan; (2) Menganalisis bagaimana tuturan tersebut membentuk/mengubah relasi kuasa dalam organisasi; (3) Mengevaluasi apakah tuturan merupakan bagian dari strategi jangka panjang (misalnya seperti polarisasi atau kooptasi).

Bibliografi

- Abdurrahman, Abdurrahman. "Pragmatik: Konsep Dasar Memahami Konteks Tuturan." *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra* 1, no. 2 (October 12, 2011): 1–19. <https://doi.org/10.18860/ling.v1i2.548>.
- Ahmad, Syihabudin. *Terjemahan Lengkap Sahih Al-Bukhari*. Sungai Buloh: Santai Ilmu Publication, 2022.
- Arterton, F. Christopher. "Strategic Political Communications." In *Strategy in Politics*, 91–116. Oxford University PressNew York, 2023. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197644836.003.0005>.
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Edited by Abu Fira. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Batubara, Herianto. "Ini Video Utuh Ahok Pidato Singgung Surat Al Maidah 51 Yang Jadi Polemik." *detiknews*, 2016. <https://news.detik.com/berita/d-3315258/ini-video-utuh-ahok-pidato-singgung-surat-al-maidah-51-yang-jadi-polemik>.
- Borg, Emma, and Sarah A. Fisher. "Meaning and Intentions." In *Meaning*, 81–94. Oxford University PressOxford, 2025. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780192866547.003.0006>.
- Carina, Jessi. "Pilkada DKI 2017 Resmi Diikuti Tiga Pasang Cagub-Cawagub." *kompas.com*, 2016. <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/24/17335191/pilkada.dki.2017.resmi.diikuti.tiga.pasang.cagub-cawagub>.
- Daghigh, Ali Jalalian, Mohammad Saleh Sanatifar, and Rokiah Awang. "Modeling van Dijk's Ideological Square in Translation Studies: Investigating Manipulation in Political Discourse Translation." *InTralinea: Online Translation Journal* 20 (2018): 1–7. <http://www.intralinea.org/archive/article/2290>.
- Dahlan, Sriwahyuni, Melaliani Gaib, and La Aba La Aba. "A Bibliometric Study of Pragmatic Studies in Language Research: Insights and Trend." *Journal of English Teaching and Linguistic Issues (JETLI)* 2, no. 2 (August 28, 2024): 56–64. <https://doi.org/10.58194/jetli.v2i2.1829>.
- Degaf, Agwin. "Kasus Ahok Dalam Perspektif Ilmu Linguistik." In *Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra IX*, 263–69. Bangkalan: Universitas Trunojoyo, 2017. <http://repository.uin->

- malang.ac.id/1940/.
- Eragamreddy, Nagamurali. "Exploring Pragmatics: Uncovering the Layers of Language and Meaning." *International Journal of Current Science Research and Review* 7, no. 3 (March 26, 2024): 1886–95. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i3-50>.
- Ferris, Gerald R., Darren C. Treadway, Pamela L. Perrewé, Robyn L. Brouer, Ceasar Douglas, and Sean Lux. "Political Skill in Organizations." *Journal of Management* 33, no. 3 (June 1, 2007): 290–320. <https://doi.org/10.1177/0149206307300813>.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Edited by Ali Audah. 39th ed. Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2010.
- Haq, Ahmad Dhiyaul. "Strategi Komunikasi Rasulullah Saw. Menghadapi Pesan Munafik, Provokasi, Dan Hoax Abdullah Bin Ubay Bin Salul." IAIN Parepare, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6078/>.
- Hardiman, Budi F. *Seni Memahami Hermeneutik Dari Scheleimajer Sampai Derrida*. Edited by Widianoro. Sleman: PT. Kanisius, 2015.
- Ifantidou, Elly. "Pragmatics and Cognition." In *The Encyclopedia of Applied Linguistics*, 1–6. Wiley, 2024. <https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0933.pub2>.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. Putusan PN Jakarta Utara tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Basuki Tjahaja Purnama (2016).
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Qur'an Kemenag." Accessed May 16, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Junges, Jonathan, Tiago Anderson Brutti, Everton da Silveira, Adriana da Silva Silveira, and Claudio Everaldo dos Santos. "Analysis on The Variations of The Concept of Power in The Political and Social Environment." *International Journal for Innovation Education and Research* 7, no. 5 (May 31, 2019): 412–18. <https://doi.org/10.31686/ijer.vol7.iss5.1544>.
- Kádár, Dániel Z., and Juliane House. "The Pragmatics of Language and Politics." In *The Encyclopedia of Applied Linguistics*, 1–6. Wiley, 2023. <https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal1464.pub2>.
- Kenny, Lisa. "Organizational Politicking: An Empirical Study on Its Application to Communication." Lund University, 2019. <http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8982984>.
- Kissine, Mikhail. "Locutionary, Illocutionary, Perlocutionary." *Language and Linguistics Compass* 2, no. 6 (November 1, 2008): 1189–1202. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1749-818X.2008.00093.x>.
- Kleszcz, Leszek. "Hermeneutic Reason as the 'Art of Understanding.'" *Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies* 37, no. 3 (2021): 441–48. <https://doi.org/10.21638/spbu17.2021.306>.
- Kortmann, Bernd. "Pragmatics: The Study of Meaning in Context." In *English Linguistics*, 173–99. Stuttgart: J.B. Metzler, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05678-8_7.
- Kristianto, Aris, and Muhammad Hildan Azizi. "Politik Dan Dakwah Dalam Sirah Nabawiyah: Studi Multikasus." *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 6, no. 1 (July 15, 2024): 23–44. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v6i1.319>.
- Longxi, Zhang. "Hermeneutics and Politics: Going beyond the Book." *KNOW: A Journal on the Formation of Knowledge* 6, no. 2 (September 1, 2022): 239–62. <https://doi.org/10.1086/721453>.
- Macedo de Medeiros Albrecht, Nayara F. "Bureaucrats, Interest Groups and Policymaking: A Comprehensive Overview from the Turn of the Century." *Humanities and Social Sciences Communications* 10, no. 1 (September 12, 2023): 565. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02044-8>.
- Mahsyar, Ahmad Dhiyaul Haq Bin. "Strategi Komunikasi Rasulullah Saw. Menghadapi Pesan

- Munafik, Provokasi, Dan Hoax Abdullah Bin Ubay Bin Salul." IAIN Parepare, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4910/>.
- Ommen, Brett. "On the Relationship between Voice and Authority in on Message Communication." *Javnost - The Public* 17, no. 4 (January 10, 2010): 63–79. <https://doi.org/10.1080/13183222.2010.11009041>.
- Parry-Giles, Trevor. "Political Communication." In *Communication in the 2020s*, 125–32. New York: Routledge, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003220466-16>.
- Purnamasari, Niken, and Fajar Pratama. "Kisah Pidato Di Pulau Seribu Yang Bawa Ahok Ke Cipinang." *detiknews*, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3496447/kisah-pidato-di-pulau-seribu-yang-bawa-ahok-ke-cipinang>.
- Ren, Wei. "Speech Acts." In *The Encyclopedia of Applied Linguistics*, 1–7. John Wiley & Sons, Ltd, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal1099.pub2>.
- Saifudin, Akhmad. "Teori Tindak Tutur Dalam Studi Linguistik Pragmatik." *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 15, no. 1 (April 8, 2019): 1–16. <https://doi.org/10.33633/lite.v15i1.2382>.
- Sbisà, Marina. "Locution, Illocution, Perlocution." In *Pragmatics of Speech Actions*, edited by Marina Sbisà and Ken Turner, 25–76. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2013. <https://doi.org/10.1515/9783110214383.25>.
- . "Speech Acts, Effects, and Responses." In *Essays on Speech Acts and Other Topics in Pragmatics*, edited by Marina Sbisà, 43–52. Oxford University Press Oxford, 2023. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192844125.003.0003>.
- Singh, Bimal Prasad. "A Study on Political Psychology and Its Influence in Modern Politics." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 11, no. 1 (2021): 9–17. <https://doi.org/10.5958/2249-7315.2021.00002.2>.
- Srubar, Ilja. "Pragmatic Theory of the Life-World and Hermeneutics of the Social Sciences." In *Schutzian Phenomenology and Hermeneutic Traditions*, edited by Michael Staudigl and George Berguno, 83–92. Dordrecht: Springer Netherlands, 2014. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6034-9_6.
- Surya, Alan, and Fenny Mahdaniar. "Peta Teori Hermeneutik Dan Implikasinya Dalam Komunikasi Dakwah." *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (January 30, 2024): 169–90. <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v2i1.23>.
- Susetyo, Benny. "Constelation Of Power Behind Communication Presidential In Intolerance Issues (Critical Discourse Analysis of the President's Statement in the Case of Meliana in Tanjungbalai)." *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 3, no. 2 (July 31, 2022): 313–31. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v3i2.216>.
- Syafi'i, Abdul Hakim, Budhi Gunawan, and Firman Manan. "Intervensi Partai Politik Dalam Sukseksi Kepemimpinan Mukhtar Mahdaniar Ke 33 Di Jombang Tahun 2015." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (2019): 213. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13622>.
- Tolochko, Petro, and Hajo G. Boomgaarden. "Determining Political Text Complexity: Conceptualizations, Measurements, and Application." *International Journal of Communication* 13 (2019): 1784–1804.
- Tsui, Amy. "Aspects of the Classification of Illocutionary Acts and the Notion of the Perlocutionary Act." *Semiotica* 66, no. 4 (1987). <https://doi.org/10.1515/semi.1987.66.4.359>.
- Vessey, David. "Gadamer and the Fusion of Horizons." *International Journal of Philosophical Studies* 17, no. 4 (October 2009): 531–42. <https://doi.org/10.1080/09672550903164459>.
- Wahid, Nur. "Jalan Dakwah PKS Dalam Tubuh Muhammadiyah (Kasus Di Yogyakarta Dalam Perspektif Politik Hannah Arendt)." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 5, no. 2 (2013): 1–26.

- Zhao, Xin. "Constructing the 'Us' and 'Them' Dichotomy through the Notion of Responsibility: An Integrated Framework." *Global Media and Communication* 19, no. 1 (April 25, 2023): 119–38. <https://doi.org/10.1177/17427665231161805>.
- Zikrullah, and Mena Sari. "Etika Komunikasi Politik Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Komunikasi Islam* 13, no. 2 (February 28, 2024): 305–22. <https://doi.org/10.15642/jki.2023.13.2.305-322>.